

DRAFT LAPORAN SINGKAT
**RAPAT KERJA PEMBICARAAN TINGKAT I RUU TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN PEMERINTAH**

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/ tanggal : Rabu/ 18 September 2019
Waktu : 19.50 – 21.19 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Mulfachri Harahap, S.H., M.H./ Ketua Panja
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat
Komisi III DPR RI.
Hadir : 5 (lima) orang Pimpinan 19 (Sembilan belas) orang anggota dari
52 (lima puluh dua) Anggota Komisi III DPR RI 9 (sembilan) Fraksi
dari 9 (sembilan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pemerintah dibuka pukul 19.50 WIB oleh Ketua Panja RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Mulfachri Harahap, S.H., M.H. dengan agenda rapat yaitu:

- Laporan Panja
- Pendapat akhir mini fraksi-fraksi
- Penandatanganan naskah RUU tentang KUHP
- Sambutan singkat Pemerintah
- Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/ Rapat Paripurna

II. KESIMPULAN

1. Ketua Panja RUU tentang KUHP menyampaikan Laporan Panja RUU tentang KUHP yang menandai berbagai perkembangan hukum di masyarakat dengan sasaran dan tujuan, antara lain:
 - Untuk menjamin kepastian hukum;
 - Menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana

- Proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;
 - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakkan norma-norma hukum;
 - Meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan
 - Memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.
2. Ketua Panja RUU tentang KUHP menyampaikan beberapa isu krusial yang berkembang dan menjadi fokus pembahasan dalam RUU tentang KUHP, antara lain:
- a. Penerapan Asas Legalitas Pasif
 - b. Perluasan Pertanggungjawaban Pidana
 - c. Penerapan Doktrin *Ultimum Remedium*
 - d. Pidana Mati
 - e. Rekodifikasi
 - f. Pengaturan tentang Tindak Pidana Khusus
3. Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mengenai RUU tentang KUHP sebagai berikut:
- Fraksi PDIP menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Golkar menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Gerindra menyatakan persetujuan dengan catatan, untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Demokrat menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi PAN menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi PKB menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi PKS menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi PPP menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Nasdem menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Hanura menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
4. Menkumham atas nama Presiden Republik Indonesia membacakan sambutan singkat Presiden dan menyampaikan persetujuan terhadap RUU tentang KUHP

untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

5. Komisi III DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU tentang KUHP untuk dilanjutkan dalam Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna dalam waktu dekat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.19 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA PANJA,

MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H.
A-459